

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Strata 1**

Oleh:

**Andri Muhamad
NIM 16250030**

Pembimbing:

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph. D.

NIP 19680610 199203 1 003

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Uj.02/DD/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA MALANGJIWAN KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRI MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 16250030
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Subang/Penguji I
Dr. Lathiful Kholid, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 501918266



Penguji II
Dr. H. Wayono, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 516205666



Penguji III
Noorlatimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 516310666

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 17 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dr. Hj. Nurjanah, M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 516406166



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adi Sucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat skripsi saudara :

Nama : Andri Muhammad
NIM : 16250030
Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan
Skripsi : Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Malangjiwan
Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu
Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami menugaskan agar skripsi tersebut diatas dapat segera
diterbitkan dan dipublikasikan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengetahui
Ketua Program Studi IKS

Pembimbing

Andayani, SIP., MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Drs. Laniful Khuluq, M.A., BSW., Ph. D.
NIP. 19680610 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andri Muhammad
NIM : 16250030
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagaian-bagaian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Andri Muhammad

16250030

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

MEREKA YANG TERBAIK DIANTARA YANG PALING BAIK YANG

PALING BAIK DIANTARA TERBAIK

KEDUA ORANGTUAKU YANG SELALU MEMBERIKAN DOA RESTU

DAN BIMBINGAN DALAM HIDUPKU, IBU NGADINAH DAN BAPAK

MADI LOSO

UNTUK KAKAK-KAKAKKU GRAZEL, YENI, BUDI, ANTY DAN YANI

BESERTA KELUARGA KECILNYA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Lakukan apa yang ingin engkau lakukan kecuali menjadi Tuhan.

“ Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lainnya). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah ayat 6-8)

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia berkata baik dan diam.

(Nabi Muhammad SAW)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, zat yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari dengan baik.

Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang-benderang seperti ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya diakhirat nanti, amin.

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti mengambil judul yaitu “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten)”. Tentu penulis menyadari dalam penyusunan masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Akhirnya penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa skripsi ini. Tentu penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini bila tidak mendapatkan

dukungan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Ibu Andayani, SIP., M.SW., selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A, BSW., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah membantu dari segi akademik maupun kelancaran penulisan skripsi serta meluangkan hati, pikiran, waktu, tenaga dan idenya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga mampu menyelesaikan.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan keilmuan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi amal *jariyah* dikemudian hari. Amin.
5. Seluruh staff dan karyawan TU di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dan memperlancar segala urusan administrasi di kampus
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Madi Loso dan Ibu Ngadinah yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Saudara-saudara saya Grazel, Yeni, Budi, Anti dan Yani serta keluarga kecilnya yang telah mendukung, memotivasi dan memdoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Suprianto selaku Kepala Desa Malangjiwan beserta jajarannya.
9. Kepala BUMDes Sumber Makmur beserta jajarannya..
10. Teman-teman IKS 2016 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan semangat baik ketika kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas, yang telah memberikan support dan bantuannya selama kurang lebih empat tahun ini.
11. Sahabat *Bring Future* yaitu Hani selalu tanpa henti menyemangatiku, Hasan selalu memberikan nasihat, Ryan yang membuatku menambah ilmu agama, Putra yang selalu selo, Baiti yang baik hati, Maulida selalu menghibur dan Bella .
12. Sahabat *Ngomes* yaitu Arfian, Desi, dan Handa
13. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Atas semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga menjadi amal kebaikan serta ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Tentunya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Tiada sesuatu apapun yang dapat dipersembahkan selain ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu tanpa terkecuali. Semoga kebaikan yang diberikan pada

penulis akan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. *Aamiin yarobbal'alamiin.....*

Yogyakarta, 07 Juni 2020
Penulis

Andri Muhammad
NIM 16250030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Andri Muhammad (16250030), Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten). Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa diamanatkan untuk memiliki badan usaha yang berguna untuk mengelola potensi desa yang dimiliki. Badan usaha tersebut sebagai penggerak dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan. BUMDes Sumber Makmur memiliki tiga unit usaha yaitu unit wisata Umbul Brintik, unit wisata Umbul Bethek dan unit usaha pengisian tangki air yang meningkatkan pendapatan asli desa dalam kurun 2 tahun. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan informan yaitu Kepala Desa Malangjiwan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Pengurus BUMDes Sumber Makmur dan masyarakat Desa Malangjiwan. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui kebenaran penelitian ditetapkan dengan keabsahan datanya menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes Sumber Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 1) Pengembangan potensi

desa dengan renovasi Umbul Bethek serta gotong royong dalam pembangunan objek wisata 2) Peningkatan kualitas kehidupan dengan pembayaran biaya premi BPJS Kesehatan 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan lansia/janda, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu 4) Pengembangan perekonomian desa dengan pengelolaan potensi objek wisata melalui setor lainya 5) Peningkatan penghasilan dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kata kunci : Peran, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Teknik Pengumpulan Data	32
I. Sistematika Pembahasan	37
BAB II GAMBARAN UMUM DESA MALANGJIWAN DAN BUMDES SUMBER MAKMUR	
A. Gambaran Desa Malangjiwan	37
1. Kondisi Geografi.....	37
2. Demografi Penduduk Desa Malangjiwan	40
3. Profil Desa Malangjiwan.....	44
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur	50
1. Sejarah BUMDes Sumber Makmur.....	50
2. Visi dan Misi BUMDes Sumber Makmur	54
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran BUMDes Sumber Makmur	55

4. Pengelolaan BUMDes Sumber Makmur	56
BAB III PERAN BUMDES SUMBER MAKMUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
A. Pengembangan Potensi Desa	61
B. Peningkatan Kualitas Kehidupan.....	68
C. Memperkokoh Perekonomi Masyarakat	76
D. Pengembangan Perekonomian Desa.....	78
E. Peningkatan Penghasilan.....	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Informan Penelitian	33
<u>Tabel 2.1 Dukuh, RT, dan RW Desa Malangjiwan</u>	39
<u>Tabel 2.2 Peruntukan Lahan Desa Malangjiwan</u>	40
<u>Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Malangjiwan</u>	
<u>Tahun 2019</u>	41
<u>Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Malangjiwan Tahun</u>	
<u>2019</u>	42
<u>Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Agama Desa Malangjiwan Tahun 2019</u> .	42
<u>Tabel 2.6 PAD Desa Malangjiwan Tahun 2015-2019</u>	43
<u>Tabel 3.1 Peran BUMDes Sumber Makmur</u>	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Desa Malangjiwan	38
Gambar 2.2 Gapura Pintu Masuk Desa Malangjiwan.....	44
Gambar 2.3 Bagan Unit Usaha BUMDes	52
Gambar 2.4 Logo BUMDes Sumber Makmur.....	53
Gambar 2.5 Struktur Kepengurusan BUMDes	57
Gambar 3.1 Umbul Bethek	62
Gambar 3.2 Kegiatan Gotong Royong di Umbul Brintik	65
Gambar 3.3 Bukti Pembayaran Premi BPJS Kesehatan Oleh BUMDes	73
Gambar 3.4 Kegiatan Keagamaan dan Doa	75
Gambar 3.5 Penerima Santunan.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagaian terkecil unit dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk sejahtera. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat 1 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pembangunan tersebut berupa pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa. Indonesia memiliki 74.093 desa, di mana lebih dari 32 ribu desa termasuk desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal di provinsi Jawa Tengah memiliki 187 desa tertinggal sedangkan Kabupaten Klaten berjumlah 5 desa.² Strategi yang dilakukan dalam menanggulangnya dengan mewujudkan kewirausahaan

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa BAB I* http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen/uu/UU_2014_6.pdf diakses tanggal 23 Desember 2019.

²Ivanovich Agusta, Desa tertinggal di Indonesia, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, vol. 1: 2 (Agustus 2017), hlm. 241.

bersumber dari desa untuk meningkatkan fasilitas untuk merubah keadaan sosial pedesaan.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah memberikan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Otonomi yang diberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan yang mandiri, kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Titik sentral pembangunan adalah pedesaan sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih terwujud. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, bidang sosial dan lainya.⁴

Desa memiliki beragam potensi, baik potensi alam dan potensi budaya, namun beragam potensi yang dimiliki tersebut masih tidak banyak dimanfaatkan desa. Desa disarankan untuk memiliki lembaga suatu badan usaha berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kebutuhan pokok dan ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, selain itu ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Perlunya kebijakan di era otonomi untuk

³Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2 : 1(Desember 2016.), hlm. 155-167.

⁴Rahardjo Adisasmitha, *Pembangunan Pedesaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm. 3.

memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di wilayah desa tersebut sebagai sumber pendapatan desa. Perkembangan desa akan didapat keuntungan dari segi ekonomi sebagai sumber pendapatan baru yang bisa jadi pendapatan dan mengubah perekonomian masyarakat.

Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, dan badan usaha yang mengurus kekayaan asli desa untuk keseimbangan dan pembangunan. Maka diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal. Lembaga tersebut untuk menunjang agar pengelolaan potensi yang dimiliki dapat dikelola dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi desa sering kali dinilai lambat dibanding dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Dalam meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan perubahan dan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* serta kemampuan pemerintah bersama pemerintah desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.⁵

Cara yang dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, di mana kewirausahaan desa menjadi strategi

⁵Saeful Bachrein, "Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.8 : 2 (Juni 2010), hlm. 133-49.

dalam mengembangkan dan pertumbuhan kesejahteraan.⁶ Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.⁷ BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁸ Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang modal berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Pendirian BUMDes merupakan perwujudan dalam pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, *sustainable*. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

⁶Bahareh Ansari, "Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas", *Jurnal of enviornmental and science* Vol 5 : 1 (Januari 2013): 26–31.

⁷Tiberius Handoko Eko Prabowo, "Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia.," *World Appliend Scien Jurnal* 30 (*Innovation Challenges in Multidiciplinery Research and Practice*, Vol 13 :1 hlm. 19-26.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.

2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
3. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat
4. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi mencatat BUMDes mengalami peningkatan sebanyak 60 persen diantaranya mencapai 45.549 unit dari total 74.957 Desa di Indonesia.⁹ Pendampingan dibutuhkan untuk menampung berbagai aktifitas ekonomi yang tumbuh di pedesaan. Total dari jumlah BUMDes yang terbentuk, sebagian besar berbasis sektor wisata dengan menonjolkan panorama alam dan kuliner di desa masing-masing. Bentuk usaha berbasis wisata lebih banyak dipilih karena dinilai memiliki prospek dan menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Modal dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya BUMDes masyarakat dilibatkan dalam pengelola

⁹Desa Memiliki BUMDes “<https://www.kemendes.go.id/view/detail/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes> diakses pada Rabu, 26 Desember 2019.

sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa. BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal.

“Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jaka Purwanto, menyampaikan perkembangan BUMDes di Klaten cukup signifikan, sejak 2010 hingga juli 2018, dari total 391 desa sudah terbentuk 219 BUMDes, 2010 hingga 2015 sebanyak 68 BUMDes terbentuk, 2016 sebanyak 77 BUMDes, 2017 sebanyak 70 BUMDes, dan Januari-Juli sebanyak 4 BUMDes. Harapannya desa-desa lain termotivasi membentuk BUMDes sebagai terobosan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.”¹⁰

BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi di pedesaan, maka harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Salah satunya yaitu BUMDes Sumber Makmur yang merupakan badan usaha yang sedang berkembang di wilayah Klaten yang terkenal di sekitarnya. BUMDes yang dikelola mempunyai peningkatan dalam pengelolaan potensi yang dimiliki sehingga menambah pendapatan asli desa. Pendapatan Desa Malangjiwan dikatakan berhasil karena masyarakat mampu bekerja sama dan

¹⁰“Kabupaten Klaten Telah Memiliki 219 BUMDes”, <http://klatenkab.go.id/klaten-sudah-memiliki-219-bumdes/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020.

mengelola potensi desa yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum melalui BUMDes Sumber Makmur yang sudah berdiri sejak 2017. BUMDes Sumber Makmur merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan ragam jenis potensi. Potensi yang dikelola yang sangat terkenal yaitu wisata pemandian Umbul Brintik yang memanfaatkan sumber air yang melimpah dari alam. Beberapa program untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pendayagunaan potensi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Desa Malangjiwan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, untuk mendorong atau menampung kegiatan pendapatan masyarakat baik yang sudah berkembang maupun kegiatan perekonomian yang nantinya dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah desa.

BUMDes Sumber Makmur mempunyai potensi dalam bidang pengelolaan air bersih, kios, kuliner dan objek wisata. Semua upaya dilakukan BUMDes agar potensi yang ada dapat meningkatkan pendapatan asli Desa Malangjiwan yang pada dasarnya Pendapatan Asli Desa (PAD) sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan. Keberadaan objek wisata tersebut yang meningkat pendapatan asli daerah yang dahulunya hanya 97 juta pertahun saat 2017 menjadi 890 juta pertahun pada 2019. Hal

tersebut tentunya menarik perhatian menjadi perubahan besar yang terjadi dan tentunya juga membawa perubahan yang besar bagi desa tersebut.

Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) diterima dari objek wisata tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan desa yang merupakan potensi-potensi yang ada di wilayah desa. Pengelolaan yang awalnya hanya pengelolaan wisata Umbul Brintik dan retribusi tangki air menjadi meningkat dengan ditambahkan objek wisata Umbul Bethek dan penyewaan kios-kios yang mulai berkembang untuk dikelola lebih serius oleh Pemerintah Desa Malangjiwan dan BUMDes Sumber Makmur. Hal tersebut tentunya masyarakat juga dapat merasakan hasil kinerja pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Malangjiwan melalui pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tema “Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan bagaimanakah peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka secara khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDes Sumber Makmur dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang telah dilakukan secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi positif terhadap penelitian yang selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapat di bangku kuliah. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun ke dunia pekerjaan
 - b. Bagi masyarakat dan desa lain dapat dijadikan contoh dalam mensejahterakan masyarakat
 - c. Bagi tempat penelitian dengan adanya penelitian ini, diharapkan sebagai bahan rujukan dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran beberapa skripsi tentang penelitian yang berkaitan dengan yang akan penulis lakukan sebagai sarana pembandingan.

Penulis menyadari sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang peran BUMDes. Namun, peran BUMDes Sumber Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum diangkat menjadi skripsi. Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema peran BUMDes, sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Aqmarina Ramadhani dengan judul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian pertama menggunakan *mixed methods*, yaitu strategi metode campuran sekuensial atau bertahap dengan menggunakan strategi eksploratoris sekuensial penelitian ini menggunakan teori pembangunan ekonomi desa dari Rondinelli yang berasumsi bahwa pembangunan di desa dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mempunyai kesimpulan hasil yaitu pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok. Masyarakat Desa Ponggok sudah berperan aktif sebagai pelaku maupun sebagai inisiator. Kerja sama dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata Ponggok sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Ponggok. Keberadaan BUMDes

mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Pongok dari segi kesejahteraan pendidikan kesehatan dan pendapatan yang meningkat.¹¹

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Yaasser Arafat dengan judul “Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Tirta Mandiri Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)”. Penelitian ini menggunakan teori organisasi P. Robbins yang mengkaji struktur, fungsi dan performansi organisasi perilaku beserta kelompok dan individu didalamnya dalam mencapai tujuan yang rumit dan luas. Penelitian ini tentang peran BUMDes Desa Pongok untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pongok. Program bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes Tirta Mandiri yaitu satu rumah satu sarjana, bantuan uang untuk penduduk lansia, program renovasi rumah tidak layak huni, program listrik yang rumahnya belum dialiri listrik dan biaya premi BPJS kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Desa.¹²

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira dan Satiti Hapsari Wahyuningsih (*Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta*) dengan judul “Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok, Kabupaten Klaten”.

¹¹Aqmarina Ramadhani, *Keberadaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017).

¹² Muhammad Yasser Arafat, *Badan Usaha Milik Desa Dan Pemeberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung di Desa Wisata Ponggok. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan desa wisata dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Penelitian ini untuk mengetahui atraksi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Ponggok, pengaruh dalam mengembangkan potensi wisata Desa Wisata Ponggok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pengembangan. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu masyarakat Desa Ponggok sudah berperan aktif sebagai pelaku maupun sebagai inisiator. Kerja sama dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata Ponggok sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok keberadaan BUMDes mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dari segi kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan pendapatan yang meningkat.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Almasri dan Devi Wimar merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul “Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan”. Penelitian ini mempunyai

¹³Eko Nur Fatmawati, *Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten* (Jurnal Penelitian Pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Surakarta, 2015).

tujuan yaitu berfokus pada menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat dan perannya dalam peningkatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pengguna dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini menggunakan 1 metode penelitian yang sama dalam menganalisis data yaitu dengan metode deskriptif kualitatif hanya menguraikan hasil dari pertanyaan wawancara saat di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan masyarakat menurut Todaro dan Stephen C Smith tentang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Permasalahan yang muncul terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁴

Kelima, yang dilakukan oleh Samadi, Arrafiqur Rohman dan Afrizal. Dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu)”. Penelitian ini mempunyai tujuan fokus pada menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat dan peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pengguna dan

¹⁴Almasari Dan Devi Deswimar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan* (Jurnal Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.).

BUMDes. Penelitian ini menggunakan satu metode penelitian yang sama Dalam menganalisis data yaitu dengan metode deskriptif kualitatif, hanya menguarakan hasil pertanyaan wawancara saat di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rostrow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Manfaat yang sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, permasalahan yang muncul akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.¹⁵

Berdasarkan kajian pustaka diatas, penelitian yang relevan lebih fokus pada peran BUMDes. Sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada peran BUMDes akan tetapi kepada upaya peningkatan kesejahteraan Selain itu perbedaan pada lokasi atau tempat, waktu, objek penelitian dan subjek yang diteliti serta fokus permasalahan memberikan pelayanan sosial. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Subjek yang diteliti yaitu masyarakat Desa Malangjiwan. Dari beberapa perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti.

F. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini akan membahas teori yang berkaitan dengan pokok penelitian ini. Kerangka teori ini sebagai acuan dan landasan dalam proses penelitian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran BUMDes

¹⁵Samadi Arrafiqur Rahman dan Afrizal, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu)* (Jurnal Skripsi, Riau, 2013).

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka peneliti menggunakan teori, yakni :

1. Tinjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Definisi BUMDes menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan suatu lembaga yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.¹⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes sebagai pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. BUMDes juga menghasilkan produk yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan

¹⁶Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008). hlm. 35

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁷ Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

- 1) Pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, menjadi dasar pembentukan
- 2) BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, bukan hanya masyarakat, bukan hanya dimiliki individu, melainkan menjadi milik Pemerintah Desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan manfaat hanya untuk anggota, BUMDes dimiliki baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan
- 3) Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatif. Artinya tidak cukup dibentuk oleh Pemerintah Desa, tetapi dibentuk musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional

¹⁷Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016). hlm. 1.

musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

4) Pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokrasi

BUMDes adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan masyarakat dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik dalam menghasilkan *output* ekonomi desa dalam mengatur distribusi *output* tersebut.¹⁸

b. Landasan Hukum BUMDes

Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

- 1) Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendoman pada peraturan perundang-undangan
- 3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peminjaman sesuai perundang-undangan

¹⁸Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koprasi Pedesaan Untuk Agroindustri* (Bogor: IPB Press, 2002). hlm. 15.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah membuat satu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi:¹⁹

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
- 3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

c. Tujuan BUMDes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjalankan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, *professional* dan mandiri. Empat tujuan utama dari BUMDes yaitu:

- 1) Mendorong perkembangan ekonomi desa

¹⁹Undang-undang Desa 2014, (*Unduang-undang Repbublik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*) (Bandung: Fokus Media, 2014). hlm. 51.

- 2) Meningkatkan perekonomian desa
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- 4) Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal

Untuk menjalankan sesuai tujuan BUMDes yakni masyarakat ikut serta mengelola dan pemerintah ikut andil dalam mengupayakan kebutuhan masyarakat tanpa memberatkan. BUMDes juga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mana mekanismenya sesuai aturan yang disepakati bersama. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan distorsi ekonomi di perdesaan karena usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan kekayaan desa tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa.

Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Pendirian BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.²⁰ BUMDes didirikan berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang diwujudkan digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa. BUMDes mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes

Organisasi pengelola BUMDes harus terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- 1) Penasihat
- 2) Pelaksana Operasional
- 3) Pengawas

²⁰Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW, *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007). hlm. 32.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk diuraikan sehingga paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawarah Desa (BPD), anggota dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1) Koorperatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi perkembangan dan keberlangsungan usahanya.

2) Partisipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3) Transparan

Aktifitas yang terpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

4) Kesetaraan (emansipasi)

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatannya harus dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

6) Berkelanjutan (*Sustainable*)

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

f. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur secara umum dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lainya atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa adalah kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat berupa dana untuk tugas pembuatan. Kerja sama usaha BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada Pemerintah

Daerah. Prosentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

2. Tinjauan Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.²¹

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.²²

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 221.

²²*Ibid.*, hlm. 223.

merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *function* yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya didalam organisasi untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.²³

a. Peran BUMDes

BUMDes sebagai lembaga berbentuk hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam

²³Muamar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 51.

peningkatan kesejahteraan desa. Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut Seyadi yaitu:²⁴

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

3. Tinjauan Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Masyarakat secara Umum

Suatu masyarakat dikatakan mengalami masalah sosial apa bila 1). Kondisi atau permasalahan yang dirasakan hampir semua masyarakat, 2). Kondisi dinilai tidak menyenangkan antara lapisan masyarakat satu dengan yang lainnya tidak sama karena hal ini bergantung pada norma

²⁴Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003). hlm. 16.

yang dianut di masyarakat, 3). Kondisi yang menuntut pemecahan masalah, 4). Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan cara kolektif, misalnya aksi sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial.²⁵

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan usaha dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial ialah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait masalah kemiskinan. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial ini dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang kemudian disebut PMKS.²⁶

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsep pertama). Yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan.

²⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.(Bandung: PT Refika Aditama). hlm. 84-85.

²⁶*Ibid*, hlm.34

Berdasarkan definisi dan pengertian kesejahteraan sosial tersebut, maka setiap kegiatan pembangunan didalamnya meliputi 2 dimensi yaitu dimensi ekonomi yang berkaitan dengan aspek material dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan aspek spiritual dan sosial. Hal ini berarti, bahwa antara dimensi ekonomi dan dimensi kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dalam konsepsi pembangunan.²⁷

Menurut Zastrow kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial semua kelompok usia, baik kaya maupun miskin. Apabila institusi-institusi lain di masyarakat suatu waktu tidak dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar dari perorang atau kelompok-kelompok orang, maka pelayanan sosial dibutuhkan dan dituntut untuk memberikan pelayanan.²⁸ Sebagai batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

. Upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Pencapaian secara kelompok dapat

²⁷Suradi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Informasi*, vol 17: 3 (2012), hlm. 149.

²⁸*Ibid.*,

diupayakan dengan membentuk paguyuban, koperasi, asosiasi dan organisasi lainnya. Berdasarkan rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi suatu kemampuan daya beli masyarakat tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan untuk hidup secara layak atau pekerjaan yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup keluarga.

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapainya masyarakat di mana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Menurut James Midgle mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: 1) Ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik 2) Ketika kebutuhan terpenuhi, dan 3) Ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

1) Setiap orang belum tentu memiliki kemampuan *management*

yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapi. Kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kesejahteraan yang berbeda dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah.

2) Setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan,

keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan non ekonomi lainnya.

- 3) Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu ada langkah memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Jadi kesejahteraan sosial akan terwujud ketika individu, keluarga, kelompok dan masyarakat²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur dalam menjelaskan sesuatu melalui beberapa tahapan yang berurutan dan sistematis³⁰. Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam mencapai suatu tujuan penelitian. Oleh karena itu, untuk mencapai hal yang maksimal dan optimal dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa tahapan metode penelitian. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁹Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 72.

³⁰Husaini Usman Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).hlm. 41.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.³¹

Penelitian studi kasus akan berkurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau suatu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditunjukkan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara mendalam dan intensif. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari studi kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.³² Yang membedakan pada metode studi kasus dengan penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisi pada kasus yang lebih spesifik.

³¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 1.

³²*Ibid.*, hlm 2.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, yakni di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Makmur yang berada di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten .

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Penentuan subjek penelitian secara tepat penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan informasi sebab dari merekalah diharapkan informasi dapat terkumpul sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian diajukan³³. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam pemilihan subjek. *Purposive Sampling* yaitu 2 pemerintah Desa Malangjiwan, 5 pegawai BUMDes dan 4 masyarakat. Kemudian yang akan menjadi subjek utama dalam tujuan penelitian ini adalah masyarakat di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Malangjiwan.

³³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009).hlm. 91-92.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci ataupun tokoh seperti ketua, pengurus, dan beberapa anggota BUMDes Sumber Makmur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:³⁴

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan di lokasi penelitian berupa wawancara langsung dengan pihak masyarakat, Pemerintah Desa Malangjiwan dan BUMDes Sumber Makmur
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang telah ada, misalnya dokumen maupun data dari instansi terkait, seperti data masyarakat yang mendapatkan manfaat.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁵

Wawancara ini dilaksanakan sebagai metode untuk mendapatkan informasi

³⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007).hlm. 103.

³⁵S Nasution, *Metodologi Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 132.

langsung di lapangan dari beberapa orang yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara struktur dan tak struktur. Wawancara struktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.³⁶ Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) informan yang dihadapi.³⁷ Pemilihan informan berdasarkan pada subjek penelitian dan beberapa informan yang mendukung untuk penguatan data. Untuk mendapatkan data maka peneliti akan mewawancarai beberapa informan, yakni

Tabel 1.1 Jumlah Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Kepala Desa Malangjiwan	1
2..	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	1
3.	Sekretaris BUMDes Sumber Makmur	1
4.	Karyawan BUMDes Sumber Makmur	3
5.	Masyarakat	3
6.	Pedagang	4

Sumber: Hasil Observasi Peneliti

2. Observasi

³⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 109.

³⁷M. Djunaidi Ghony Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 196.

Observasi dilakukan langsung oleh peneliti dengan terjun ke lokasi untuk mengamati kehidupan masyarakat. Hasil observasi kemudian dituangkan dalam bentuk catatan lapangan, baik berupa interaksi, kegiatan, perilaku, organisasi, atau aspek yang lainya seperti pengalaman manusia yang diamati.³⁸ Observasi dilakukan oleh peneliti secara berkala, hal ini untuk mengumpulkan data sehingga didapat data yang akurat. Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang dapat mendukung penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung pada masyarakat yang berada di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Teknik penelitian observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan, di mana peneliti tidak memosisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat digunakan untuk membuktikan data dalam bentuk seperti gambar, catatan, dan lainya sebagai yang dapat dijadikan bukti penelitian. Kegiatan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi telah didokumentasikan dalam bentuk foto, catatan observasi, arsip, maupun rekaman wawancara yang telah dilakukan.³⁹ Sebagai penunjang dalam

³⁸ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Wali Press, 2012)..hlm. 65.

³⁹*Ibid.*, hlm. 68.

penelitian pengumpulan data maka peneliti akan menggunakan kamera atau *handphone* untuk mengambil gambar, *recorder* atau *handphone* untuk merekam suara, serta dokumentasi tertulis lainnya.

4. Metode Analisi Data

Metode analisis data dilakukan untuk menganalisis makna yang diinformasikan, data, dan proses suatu fenomena sosial.⁴⁰ Ada tiga macam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu.⁴¹

a. Reduksi data

Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilih, mengurangi atau membuang, yang tidak diperlukan. Data yang telah terkumpul kemudian disusun berdasarkan tema, setelah data tersusun barulah akan diberi kode.⁴² Reduksi data yang dilakukan peneliti untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan memilih dan memilah data yang penting terkait fokus permasalahan. Setelah transkrip hasil wawancara, peneliti mengelompokkan data dengan kode sesuai dengan beberapa golongan seperti ekonomi, budaya, sosial dan pemerintah desa.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur yang jelas. Data yang telah dikelompokkan atau diberi kode, kemudian dilakukan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 85.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 125-126.

⁴²*Ibid.*,

pengkondisian data sesuai dengan penelitian.⁴³ Penulis menggunakan penyajian data dengan menguraikan singkat dalam bentuk narasi untuk menjelaskan mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malangjiwan.

c. Pengambilan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengacu pada pola-pola keterhubungan antar data yang diperoleh dalam penelitian.⁴⁴ Dalam penarikan kesimpulan peneliti berdasarkan pada proses analisis data dengan menggunakan teori peran.

5. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi data ini sebagai alat untuk mengecek keabsahan data yang dikumpulkan. Triangulasi data dalam kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Adapun pengecekan data dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga mendapatkan posisi sebenarnya. Posisi ini dimaksud sebagai kebenaran data.⁴⁵

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengecekan data dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini artinya mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan teknik yang sama yaitu wawancara. Peneliti melakukan pengecekan dengan

⁴³*Ibid.*, hlm. 129-135.

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵Asmi Manzila, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 96.

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui tentang peran BUMDes Sumber Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah yang dilakukan dalam tahap triangulasi data yakni :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan terkait BUMDes Sumber Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hasil wawancara dan pengamatan.
- 2) Membandingkan perspektif narasumber dengan lain.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh, menyeluruh, dan sistematis tentang skripsi yang ditulis oleh penulis. Sehingga akan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini titik adapun skripsi ini akan dibagi menjadi empat BAB, sebagai berikut

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

BAB II gambaran umum lokasi penelitian berisi tentang gambaran Desa Malangjiwan dan BUMDes Sumber Makmur Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi, letak geografis, struktur organisasi, sasaran dan strategi program kerja.

BAB III berisi mengenai hasil penelitian terkait peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

BAB IV merupakan bab penutup menyajikan tentang kesimpulan, saran-saran yang membangun untuk berbagai pihak, kata penutup dan lampiran-lampiran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari berjalanya program-program BUMDes Sumber Makmur yang sudah berjalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu

1. Berperan untuk pengembangan potensi desa dengan melakukan renovasi sarana dan prasarana yang ada di Umbul Bethek serta melibatkan masyarakat saling gotong royong dalam pembangunan potensi objek wisata di Desa Malangjiwan melalui rapat/ rembug desa setiap 6 bulan dan membersihkan area wisata setiap 1 bulan. Berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan dengan memberikan dukungan kesehatan berupa pemberian bantuan pembayaran premi BPJS Kesehatan pada masyarakat untuk fasilitas kelas III. Berperan memperkokoh perekonomian masyarakat melalui program-program untuk membantu masyarakat dengan memberikan bantuan santunan lansia atau janda, santunan anak yatim dan masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Berperan pengembangan perekonomian desa dengan mengelola potensi objek wisata sumber air di Umbul Brintik dan Umbul Bethek hasilnya pendapatan asli desa 2 tahun ini meningkat.

Berperan untuk peningkatan penghasilan dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran melalui perekrutan karyawan bagi warga sekitar dan pedagang yang semakin meningkat.

2. BUMDes selama ini memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kondisinya akan semakin mengkhawatirkan apabila BUMDes tidak mampu mempertahankannya di tengah wabah covid 19 ini. Maka diperlukan adanya pendampingan dan penguatan dari sisi kelembagaan dan usaha untuk mendukung keberlanjutan BUMDes. Saat ini mampu menyatukan masyarakat untuk saling bergotong royong dalam mengelola serta mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi para akademisi, penelitian selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih komprehensif tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di unit desa lainya. Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dari sisi metode, teori, maupun hasil yang berbeda.
2. Kepada masyarakat Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten agar selalu mendukung program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes Sumber Makmur serta menerima perubahan yang baik.

3. Kepada Pemerintah, peran dari dana desa sangat penting bagi perkembangan desa, harapan kedepan mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat desa.
4. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah eksistensi BUMDes di sektor pariwisata paling banyak terimbas dari wabah covid-19 ini, sehingga diharapkan adanya kebijakan yang dapat membangkitkan BUMDes tersebut.
5. BUMDes membantu atau meringankan beban masyarakat kurang mampu di Desa Malangjiwan akan tetapi dengan syarat kegiatan atau usaha yang dijalankan dikelola dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing, bahkan jika program-program ini dilakukan disetiap daerah-daerah yang tertinggal maka daerah tersebut akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, 2nd edisi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

Adisasmitha, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Creswell, John W, *Reseach Desgn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix, Terjemahan dari Reseach Design Quantitative, and Mixed Method Aproaches*, 2 nd, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007.

Djunaidi Ghony Fauzan Al Manshur, M. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Wali Press, 2012.

Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Hawari, Dadang, *Dimensi Religi Dalam Praktik Psikiatri dan Psikologi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Himawan, Muamar, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Nasution, Muslimin, *Pengembangan Kelembagaan Koprasi Pedesaan Untuk Agroindustri*, Bogor: IPB Press, 2002.

Nasution, S. *Metodologi Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Purnomo Setiadi, Akbar, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*, Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Suwandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Undang-undang Desa 2014. (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*). Bandung: Fokus Media, 2014.

SKRIPSI DAN JURNAL

Ivanovich Agusta, “Desa tertinggal di Indonesia”, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1: 2, 2017.

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2 : 1, 2017.

Ansari, Bahareh, “Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas.” *Jurnal of enviornmental and science*, Vol 5:1, 2013.

Arrafiqur Rahman dan Afrizal, Samadi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Skripsi*, Riau, 2013.

Bachrein, Saeful, “Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan”, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 8, Vol 1:2 .2016.

Dan Devi Deswimar, Almasari, Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*, 2016.

Fatmawati, Eko Nur. Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. *Jurnal Penelitian Pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Surakarta*, 2015.

Prabowo, T.H.E. “Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia.” *World Applied Science Journal 30(Innovation Challenges in Multidisciplinery Research and Practice, Vol 13 : 1*, 2014.

Ramadhani, Aqmarina, *Keberadaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*. 2017: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. 2017.

Suradi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Informasi*, vol 17: 3, 2012.

Wijaya , Rahma Guna , Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam, *Jurnal IAIN Pontianak*, 2017.

INTERNET

Desa Memiliki BUMDES ,<https://www.kemendes.go.id/view/detail/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes> di akses pada Rabu, 26 Desember 2019.

Kabupaten Klaten Telah Memiliki 219 BUMDES,<http://klatenkab.go.id/klaten-sudah-memiliki-219-bumdes/>, di akses pada tanggal 17 Januari 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB I http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen/uu/UU_2014_6.pdf di akses tanggal 23 Desember 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 32 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

